

TESIS

**PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA DALAM
PELAKSANAAN JABATAN NOTARIS DITINJAU DARI KEWENANGAN
NOTARIS YANG DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS**



PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA
SURABAYA**

2023

Halaman Prasyarat Gelar

TESIS

**PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA DALAM
PELAKSANAAN JABATAN NOTARIS DITINJAU DARI KEWENANGAN
NOTARIS YANG DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS**

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan

Program Studi Magister Kenotariatan

Fakultas Hukum

Universitas Narotama Surabaya

Disusun Oleh:

**PROPATRIA
SEMMY SLAMET**

NIM. 12221009

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NAROTAMA

SURABAYA

2023

Lembar Persetujuan

**TESIS INI TELAH DISETUJUI UNTUK DI SIDANGKAN
PADA TANGGAL 8 FEBRUARI 2023**

Oleh Dosen Pembimbing :

Dr.H.R.Ibnu Arly, S.H,M.Kn.

PRO PATRIA

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

Universitas Narotama

Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum.

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah Direvisi

Pada Tanggal 14 Februari 2023

Oleh Dosen Pembimbing :

Dr. H.R. Ibnu Arly, S.H.,M.Kn.

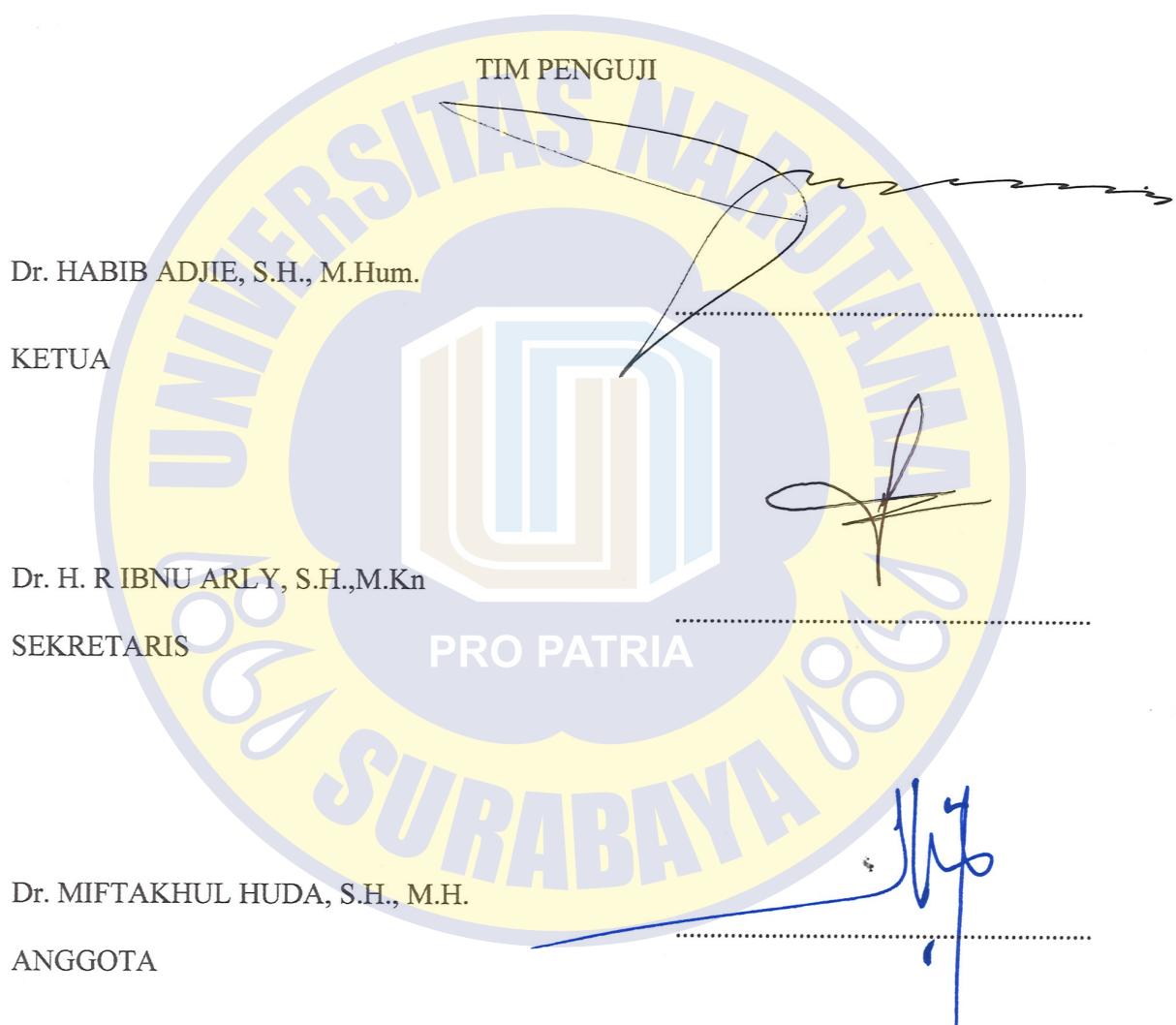


Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Universitas Narotama

Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan sidang Tim Pengaji Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya dan dinyatakan telah disetujui serta diterima dengan baik untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada tanggal 08 Februari 2023.



TESIS

PADA TANGGAL : 8 FEBRUARI 2023

TIM PENGUJI TESIS

PRO PATRIA

- Ketua : Dr. HABIB ADJIE S.H., M.Hum 
- Anggota : Dr. H. R IBNU ARLY SH, MKn 
- 
- : Dr. MIFTAKHUL HUDA, SH, MH



**FAKULTAS HUKUM, EKONOMI, DAN PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
*Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578***

FORM PENGAJUAN JUDUL TESIS*

Nama Mahasiswa : SEMMY SLAMET

No. Induk Mahasiswa : 12221009

Program Studi/Angkatan : Magister Kenotariatan / 22

Dengan ini mengajukan judul penelitian hukum (Tesis) pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Narotama Surabaya, dengan alternatif judul sebagai berikut:

1. Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris
Ditinjau Dari Kewenangan Notaris Yang Diatur Dalam UUJN

Untuk disetujui sebagai Judul Tesis dengan Pembimbing:

1. Dr. H. R. IBNU ARLY, S.H., M.Kn
2. _____
3. _____

Menyetujui,
Ketua Program Studi

Dr. HABIB ADJIE, S.H., M.Hum

Surabaya, 12 Oktober 2022
Mahasiswa

SEMMY SLAMET

* Pengajuan Judul Tesis harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa
2. Fotocopy Kuitansi Pembayaran SPP s/d bulan pengajuan dan uang Tesis
3. Kartu Hasil Studi (KHS) Semester 2 (IPK Minimal 3,00)
4. F/C Sertifikat Seminar MKn



UNIVERSITAS *Narotama*

Jl. Arif Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

**FAKULTAS HUKUM, EKONOMI, DAN PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578**

FORM KESEDIAAN MEMBIMBING TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. H. R. IBNU ARLY, S.H., M.Kn

Jabatan Fungsional : Dosen

Dengan ini menyatakan kesediaan untuk membimbing:

Nama Mahasiswa : SEMMY SLAMET

No. Induk Mahasiswa : 12221009

Judul : Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Dalam Pelaksanaan
Jabatan Notaris Ditinjau Dari Kewenangan Notaris Yang Diatur
Dalam UUJN

Surabaya, 12 Oktober 2022
Calon Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Dr. H. R. Ibnu Arly".

Dr. H. R. IBNU ARLY, S.H., M.Kn

*) Pengajuan calon pembimbing dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan Kaprodi mengenai nama calon pembimbing.

**FAKULTAS HUKUM, EKONOMI, DAN PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578**

FORM PERSETUJUAN DEWAN TESIS*

Berdasarkan pengajuan judul dan calon dosen pembimbing yang diajukan dan setelah melalui proses verifikasi/pemeriksaan terhadap:

1. Persyaratan penulisan tesis;
2. Kualifikasi calon pembimbing dan kuota maksimal pembimbingan;
3. Kesesuaian judul tesis dengan Rencana Induk Penelitian Fakultas dan Prodi; dan
4. Originalitas judul tesis;

Maka Dewan Tesis menyetujui/tidak menyetujui *) judul dan calon pembimbing tesis sebagai berikut:

- | | | |
|---|--|---|
| I. | Nama Mahasiswa
Nomor Induk Mahasiswa
Program Studi | : SEMMY SLAMET
: 12221009
: Magister Kenotariatan |
| II. | Judul Tesis | : Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Dalam |
| Pelaksanaan Jabatan Notaris Ditinjau Dari Kewenangan Notaris Yang Diatur Dalam UUJN | | |
| III. | Pembimbing | : Dr. H. R. Ibnu Arly, S.H., M.Kn |

Disetujui oleh Dewan Tesis,

Di Surabaya Pada Tanggal

8 Desember 2022,

Sekretaris

Ketua

Dr.MOH. SALEH, S.H., M.H.

TAHEGGA PRIMANANDA A. S.H., M.H.

* coret yang tidak perlu



UNIVERSITAS

*Narotama***FAKULTAS HUKUM**

Program Studi Ilmu Hukum (S1/ Akreditasi B)
Program Studi Ilmu Hukum (S2/ Akreditasi B)
Program Studi Kenotariatan (S2/ Akreditasi B)

Jl. Arief Rachman Hakim Nomor 51, Surabaya - 60117
Telepon: 031 - 5946404, 5995578 Fax: 031 - 5931213
Website: fh.narotama.ac.id Email: dekan.fh.@narotama.ac.id

SURAT PENUGASAN
No.245/NR-FH/03/X/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dekan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya,
dengan ini menugaskan kepada:

Pembimbing	NIM	Nama Mahasiswa	Judul Tesis
Dr. H. R. Ibnu Arly, S.H., M.Kn	12221009	Semmy Slamet	Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris ditinjau dari Kewenangan Notaris yang di atur dalam UUJN

Pembimbing yang namanya tercantum diatas, ditugaskan untuk melakukan pembimbingan kepada mahasiswa dalam menyelesaikan penyusunan Tesis dengan judul yang dimaksud.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PRO PATRIA

Surabaya, 18 Oktober 2022

Dekan



Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM, EKONOMI, DAN PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

KARTU BIMBINGAN PROPOSAL TESIS

Nama Mahasiswa : SEMMY SLAMET
No. Induk : 12221009
Alamat : VALENCIA SPRING BLOK DD2 No. 34, GEDANGAN - SIDOARJO
Telp/HP : 081253260034
Pembimbing : Dr. H. R. IBNU ARLY, S.H., M.Kn
Judul Tesis : PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA DALAM
PELAKSANAAN JABATAN NOTARIS DITINJAU DARI KEWENANGAN
NOTARIS YANG DIATUR DALAM UUJN
Tgl Dimulai : 12 OKTOBER 2022

Pembimbing

Dr. H. R. IBNU ARLY, S.H., M.Kn

Surabaya, 8 Desember 2022
Mahasiswa

SEMMY SLAMET

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dr. HABIB ADJIE, S.H., M.Hum



FAKULTAS HUKUM, EKONOMI, DAN PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

NO	MATERI	TGL	PARAF PEMB.
1	Pembahasan Judul dan Latarbelakang	15 / 10 22	<i>[Signature]</i>
2	Pembahasan Latar belakang / Rumusan masalah	22 / 10 22	<i>[Signature]</i>
3	Membahas Rumusan masalah	29 / 10 22	<i>[Signature]</i>
4	Pembahasan Teori Revisi Kata-kata	13 / 11 22	<i>[Signature]</i>
5	Teori Surat Sistematis Penulisan	19 / 11 22	<i>[Signature]</i>

Syarat :

1. Pengajuan seminar proposal Tesis setelah bimbingan minimal 5 kali
2. Diperbolehkan Seminar setelah 2 bulan, terhitung setelah surat tugas bimbingan dikeluarkan

SURAT KETERANGAN LULUS UJI PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan beserta Dewan Skripsi , Tesis Magister Ilmu Hukum dan Magister Kenotariatan menerangkan bahwa :

1. Nama Mahasiswa :Semmy Slamet
2. NIM :12221009
Judul Skripsi /Tesis :Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris ditinjau dari Kewenangan Notaris yang diatur dalam UUJN

Menerangkan bahwa mahasiswa tersebut telah **Lulus Uji Plagiat** pada tanggal 7 Desember 2022
Dan mahasiswa tersebut bisa melanjutkan ujian Proposal.

Mengetahui:

Dr. Moh.Saleh, S.H, M.H
Ketua dewan Skripsi dan Tesis

Tahegga Primananda A, S.H, M.H
Sekretaris Dewan Skripsi Tesis

Dekan,



Dr. Rusdianto Sesung, S.H, M.H.

**FAKULTAS HUKUM, EKONOMI, DAN PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578**

FORM PENGAJUAN UJIAN PROPOSAL*

Nama Mahasiswa : SEMMY SLAMET

No. Induk Mahasiswa : 12221009

Program Studi/Angkatan : Magister Kenotariatan / 22

Dengan ini mengajukan permohonan UJIAN PROPOSAL TESIS pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Narotama Surabaya, dengan judul sebagai berikut:

PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA DALAM PELAKSANAAN
JABATAN NOTARIS DITINJAU DARI KEWENANGAN NOTARIS YANG DIATUR
DALAM UUJN

Menyetujui Untuk Diuji
Pembimbing,

Surabaya, 8 Desember 2022
Ka. Prodi

Dr. H. R. IBNU ARLY, S.H., M.Kn.

Dr. HABIB ADJIE, S.H., M.Hum.

* Pengajuan ujian proposal tesis diajukan paling cepat 2 (dua) bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat Penugasan Pembimbingan, dengan ketentuan harus menyertakan:

1. Fotocopy Surat Penugasan Pembimbingan
2. Proposal Tesis 3 rangkap



UNIVERSITAS *Narotama*

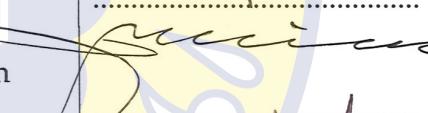
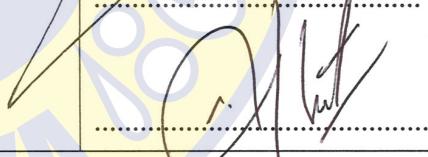
Jl. Arif Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

**FAKULTAS HUKUM, EKONOMI, DAN PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
*Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578***

PERSETUJUAN PERBAIKAN PENILAIAN PROPOSAL TESIS

NAMA : Semmy Slamet
N I M : 12221009
Tanggal Penilaian : 13 Desember 2022
Judul Proposal Tesis : Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris ditinjau dari Kewenangan Notaris yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris
Pembimbing : Dr. H. R. Ibnu Arly, S.H., M.Kn

PANITIA PENILAIAN PROPOSAL TESIS

DOSEN PENGUJI	NAMA	TANDA TANGAN
KETUA	Dr. H. R. IBNU ARLY, S.H., M.Kn	
ANGGOTA	Dr. HABIB ADJIE, S.H., M.Hum	
ANGGOTA	Dr. MOH. SALEH, S.H., M.H	

Surabaya, 20 Desember 2022

Pembimbing,

Dr. H. R. IBNU ARLY, S.H., M.Kn

Catatan:

- Wajib di kumpulkan minimal 1 minggu setelah ujian proposal tesis ke pembimbing.



FAKULTAS HUKUM, EKONOMI, DAN PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

KARTU KEHADIRAN MENGIKUTI PROPOSAL TESIS

Nama Mahasiswa : Semmy Slamet

No. Induk : 12221009

NO	NAMA PENYAJI	JUDUL PENELITIAN	TGL	PARAF PEMBIMBING
1	PRISKILA FRANSISCA HARYONO	PENERAPAN ASAS TABELLIONIS OFFICIUM FIDELITER EXERCEBO DALAM PERLINDUNGAN HUKUM KEPADА PARA PIHAK YANG MEMBUAT AKTA BERITA ACARA E-RUPS	13-12-2022	
2	ANJAR WIDHARETNO	KEDUDUKAN SERTIFIKAT HAK ATAS MEREK SEBAGAI JAMINAN PERBANKAN DALAM PERSPEKTIF PP NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANA UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2019	13-12-2022	
3	SITI CHAYATUN	KEWAJIBAN MELAMPIRKAN KARTU BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN UNTUK TRANSAKSI JUAL BELI TANAH DIHADAPAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH	13-12-2022	
4	SEMMY SLAMET	PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA DALAM PELAKSANAAN JABATAN NOTARIS DITINJAU DARI KEWENANGAN NOTARIS YANG	13-12-2022	

FAKULTAS HUKUM, EKONOMI, DAN PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

		DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS		
5	RINDA AVEYUANA DJAMI	KEDUDUKAN HUKUM PUTUSAN MAJELIS PENGAWAS PUSAT NOTARIS REPUBLIK INDONESIA DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP NOTARIS	13-12-2022	
6	MUHAMMAD HASAN	KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA YANG DIDALAMNYA TERDAPAT KLAUSULA EKSONERASI	13-12-2022	
7	KICUK HARIawan		13-12-2022	
8	ACHMAD SUBAGYO	PRO PATRIA	13-12-2022	

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum

Surabaya 13 Desember 2022

Mahasiswa

Semmy Slamet



UNIVERSITAS *Narotama*

Jl. Arif Rahman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

**FAKULTAS HUKUM, EKONOMI, DAN PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578**

KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Semmy Slamet
No. Induk : 12221009
Alamat : Valencia Spring Blok DD2 No. 34
Telp/HP : 081253260034
Pembimbing : Dr. H. R. Ibnu Arly, S.H., M.Kn.
Judul Tesis : Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Dalam Pelaksaan Jabatan Notaris Ditinjau Dari Kewenangan Notaris Yang Diatur Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris
Tgl Dimulai :

Surabaya, 5 Februari 2023

Mahasiswa

Semmy Slamet

Dr. H. R. Ibnu Arly, S.H., M.Kn.

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum.

FAKULTAS HUKUM, EKONOMI, DAN PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

NO	MATERI	TGL	PARAF PEMB.
1	Revisi Proposal Tesis	14 -12-2022	
2	BAB II 2.1 Membahas Notaris sebagai pejabat umum 2.2 Pengertian kewenangan seorang Notaris	18-12-2022	
3	BAB II 2.3 Kewajiban Notaris untuk merahasiakan informasi dari klien 2.4 Kode etik Notaris	25-12-2022	
4	BAB II 2.5 Mengenai tentang kewajiban ingkar Notaris 2.6 Permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan jabatan Notaris 2.7 Asas preferensi hukum	8-01-2023	
5	BAB III 3.1 Jabatan Notaris sebagai jabatan	15-01-2023	

FAKULTAS HUKUM, EKONOMI, DAN PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

	terhormat (<i>officium nobile</i>) 3.2 Hakikat Notaris 3.3 Hakikat dan Jenis Sanksi 3.4 Harmonisasi UUJN dengan Peraturan Pelaksana dan Peraturan Kebijakan		
6	BAB IV Kesimpulan dan Saran 4.1 Kesimpulan 4.2 Saran	22-01-2023	
7	Daftar Pustaka	4-02-2023	

Syarat :

1. Pengajuan seminar proposal Tesis setelah bimbingan minimal 12 kali
2. Diperbolehkan Seminar setelah 2 bulan, terhitung setelah surat tugas bimbingan dikeluarkan



UNIVERSITAS

Narotama

FAKULTAS HUKUM



Program Studi Ilmu Hukum (S1/ Akreditasi B)
Program Studi Ilmu Hukum (S2/ Akreditasi B)
Program Studi Kenotariatan (S2/ Akreditasi B)

Jl. Arief Rachman Hakim Nomor 51, Surabaya - 60117
Telepon: 031 - 5946404, 5995578 Fax: 031 - 5931213
Website: fh.narotama.ac.id Email: dekan.fh.(@narotama.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS UJI PLAGIASI NASKAH SKRIPSI / TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan beserta Dewan Skripsi /Tesis Magister Ilmu Hukum dan Magister Kenotariatan menerangkan bahwa :

1. Nama Mahasiswa : Semmy Slamet
2. NIM : 12221009
Judul Skripsi /Tesis : Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris ditinjau dari Kewenangan Notaris yang di atur dalam UUJN

Menerangkan bahwa mahasiswa tersebut telah **Lulus Uji Plagiasi Naskah Skripsi / Tesis** pada tanggal 31 Januari 2023

Mengetahui:


Dr. Moh. Saleh, S.H., M.H.
Ketua dewan Skripsi dan Tesis


Tahegga Primananda ,S.H, M.H
Sekretaris Dewan Skripsi Tesis

Dekan,




Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H.

**FAKULTAS HUKUM, EKONOMI, DAN PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

FORM PENGAJUAN UJIAN TESIS*

Nama Mahasiswa : Semmy Slamet

No. Induk Mahasiswa : 12221009

Program Studi/Angkatan : Magister Kenotariatan / 22

Dengan ini mengajukan permohonan UJIAN TESIS pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Narotama Surabaya, dengan judul sebagai berikut:

**PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA DALAM PELAKSANAAN
JABATAN NOTARIS DITINJAU DARI KEWENANGAN NOTARIS YANG DIATUR
DALAM UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS**

Mengetahui

Pembimbing,



Dr. H. R. Ibnu Arly, S.H., M.Kn.

Surabaya, 5 Februari 2023

Mahasiswa



Semmy Slamet

Menyetujui Untuk Diuji
Ka. Prodi



Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum.

* Pengajuan Ujian Tesis diajukan paling cepat 6 (Enam) bulan setelah tanggal di keluarkannya surat Bimbingan Tesis, dengan ketentuan harus menyertakan:

1. Kartu Pembimbingan (minimal 12 kali pembimbingan)
2. Sertifikat TOEFL/ILT dengan skor minimal 475 (Extern dari semua PTN, PTS(PETRA, UBAYA), EF, IALF, KELT)
3. Telah meyelesaikan 40 SKS & Tidak memiliki nilai D
4. Tesis 3 rangkap dengan softcover warna Biru UNNAR

FAKULTAS HUKUM, EKONOMI, DAN PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

PERSETUJUAN PERBAIKAN PENILAIAN NASKAH TESIS

NAMA : Semmy Slamet
N I M : 12221009
Tanggal Penilaian : 8 Februari 2023
Judul Tesis : PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA DALAM PELAKSANAAN JABATAN NOTARIS DITINJAU DARI KEWENANGAN NOTARIS YANG DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS
Pembimbing : Dr. H. R. Ibnu Arly, S.H., M.Kn

PANITIA PENILAIAN NASKAH TESIS

DOSEN PENGUJI	NAMA	TANDA TANGAN
KETUA	<u>Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum.</u>
ANGGOTA	<u>Dr. H. R. Ibnu Arly, S.H., M.Kn</u>
ANGGOTA	<u>Dr. Miftakhul Huda, S.H., M.H</u>

Surabaya, 14 Februari 2023

Pembimbing,

Dr. H. R. Ibnu Arly, S.H., M.Kn

Catatan:

- Wajib di kumpulkan minimal 1 minggu setelah ujian proposal tesis ke pembimbing.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Bersama ini saya menyatakan bahwa tesis ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Magister di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya/ pendapat yang pernah di tulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam masalah naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hari di temukan sebaliknya, maka saya bersedia menerima akibat berupa sanksi akademis dan sanksi lain yang diberikan oleh pihak yang berwenang dan pihak universitas, sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 10 September 2022

Yang Membuat Pernyataan



SEMMY SLAMET
NIM. 12221009

KATA PENGANTAR

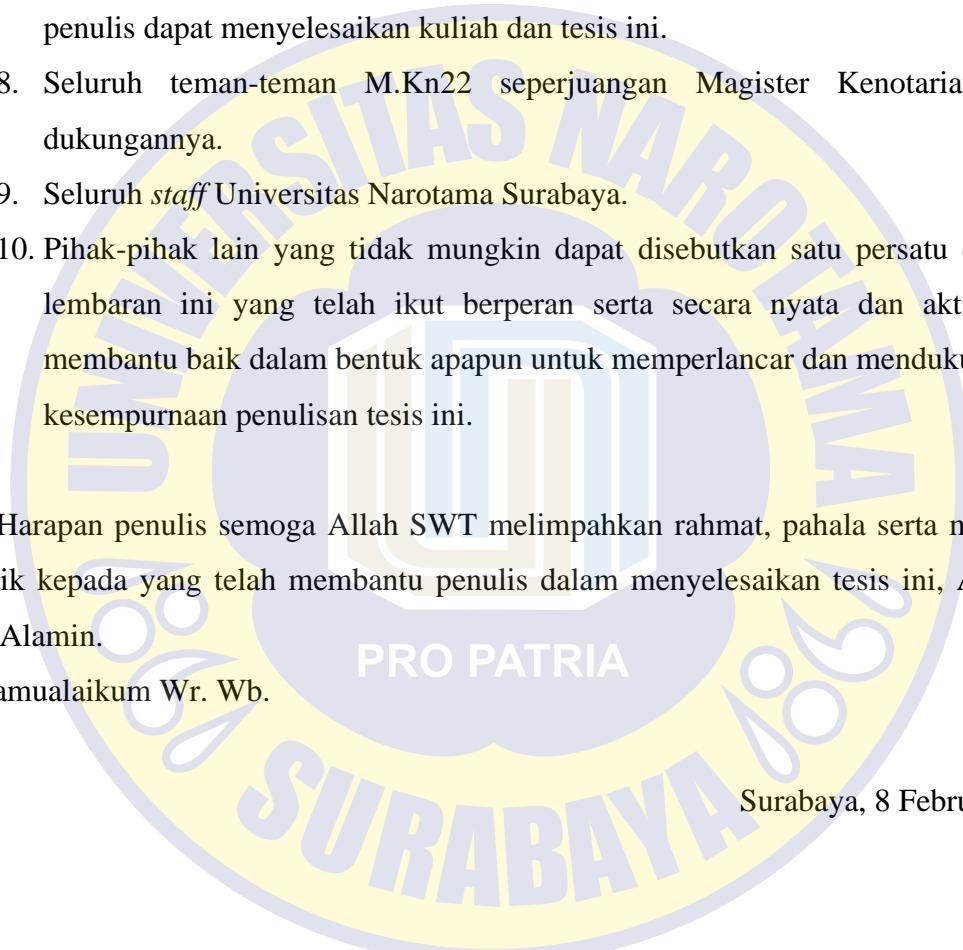
Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis dengan judul:

“PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA DALAM PELAKSANAAN JABATAN NOTARIS DITINJAU DARI KEWENANGAN NOTARIS YANG DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS”.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat guna mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Program Pasca Sarjana Universitas Narotama dan penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, tesis ini tidak mungkin penulis susun, oleh karena itu sudah semestinya penulis menghaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Assoc. Prof. Dr. Arasy Alimudin, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Narotama Surabaya.
2. Bapak Dr. H. R. Ibnu Arly, S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, petunjuk dan saran-saran yang bermanfaat serta dalam membimbing penulis hingga terselesaiannya tesis ini.
3. Bapak Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya.
4. Bapak Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya.
5. Ibu Koestiaty, S. Sos. Selaku Kepala Bagian Administrasi Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Narotama Surabaya.

- 
7. Kedua Orang Tua penulis Bapak Slamet Usman dan Ibu Melani Rahman, kedua Mertua penulis Bapak Djoko Malis, S.E., dan Ibu Sufie Ethika, S.H., Istri tercinta Intan Triyasmina Atiqa, S.AB., dan anak tersayang Nabil Maulana Usman selama ini telah senantiasa memberikan do'a, kasih sayang, pengorbanan dan dukungan, serta keluarga besar penulis yang juga memberikan dukungannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah dan tesis ini.
 8. Seluruh teman-teman M.Kn22 seperjuangan Magister Kenotariatan atas dukungannya.
 9. Seluruh *staff* Universitas Narotama Surabaya.
 10. Pihak-pihak lain yang tidak mungkin dapat disebutkan satu persatu di dalam lembaran ini yang telah ikut berperan serta secara nyata dan aktif dalam membantu baik dalam bentuk apapun untuk memperlancar dan mendukung demi kesempurnaan penulisan tesis ini.

Harapan penulis semoga Allah SWT melimpahkan rahmat, pahala serta membalas budi baik kepada yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini, Amin Ya Rabbal Alamin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Surabaya, 8 Februari 2023

Semmy Slamet

ABSTRAK

Notaris merupakan pejabat umum pembuat Akta Autentik yang diangkat oleh pemerintah, diberi tugas oleh kekuasaan umum untuk melayani kebutuhan masyarakat. Notaris harus dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan perlindungan masyarakat sebagai pemangku kepentingan. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) meminta Notaris menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) dalam melaksanakan jabatannya pada proses pembuatan akta, dan saat menuangkan kesepakatan para pihak, Notaris harus menerapkan identifikasi, verifikasi, dan pemantauan, agar yang disepakati para pihak tidak bertentangan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Peraturan Perundang-undangan lainnya serta melakukan pemantauan transaksi sumber dana kliennya dan melaporkan terkait adanya indikasi pelanggaran Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagaimana diatur di dalam Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017.

Penulis dalam penelitian ini ingin menelaah dan menganalisa lebih lanjut tentang konflik norma antara kewajiban Notaris dalam merahasiakan isi akta berdasarkan UUJN dengan kewajiban Notaris melaporkan isi akta pada transaksi keuangan yang mencurigakan serta akibat hukum terhadap Notaris yang tidak menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau bahan hukum sekunder sedangkan pendekatan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan Undang-undang dan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip mengenali pengguna jasa bagi Notaris hanya menentukan syarat formal dalam pembuatan akta autentik berdasarkan UUJN, dan tidak memiliki tanggung jawab untuk menentukan kebenaran materiil sebagaimana berdasarkan Permenkuham Nomor 9 Tahun 2017. Berdasarkan hierarki peraturan Perundang-undangan Notaris tidak wajib untuk melaksanakan Permenkuham Nomor 9 Tahun 2017 yang mana prinsipnya Permenkuham tersebut bertentangan dengan Pasal 16 ayat 1 huruf (f) Undang-undang Jabatan Notaris yang memberikan pengecualian kepada Notaris berkaitan dengan kerahasiaan jabatannya apabila diperintahkan oleh Undang-undang bukan peraturan Perundang-undangan. Seorang Notaris tidak bisa dikenakan sanksi Administrasi, dan belum bisa menjalankan kewajiban yang diperintahkan Permenkuham Nomor 9 Tahun 2017, karena belum jelasnya peraturan tersebut karena peraturan pelaksana harus selaras atau harmonis dengan peraturan perundang-undangan yang ada diatasnya atau yang memerintahkan untuk membentuknya.

Kata Kunci : Notaris, Undang-Undang Jabatan Notaris, Prinsip Mengenali Pengguna Jasa

ABSTRACT

Notary is a general official who makes Authentic Deeds who are appointed by the government, assigned by the general authority to serve the needs of the community. Notaries must be able to carry out their duties and responsibilities by applying the precautionary principle and protecting the public as stakeholders. The Ministry of Law and Human Rights (Kemenkumham) asks Notaries to apply the Principles of Recognizing Service Users (PMPJ) in carrying out their positions in the deed making process, and when writing the agreement of the parties, the Notary must implement identification, verification and monitoring, so that what is agreed upon by the parties does not contrary to the Law on Notary Office (UUJN) and other laws and regulations as well as monitoring transactions on sources of client funds and reporting regarding indications of violations of the Crime of Money Laundering (TPPU) as stipulated in Permenkumham Number 9 of 2017.

The author in this study wants to examine and analyze further the conflict of norms between the notary's obligation to keep the contents of the deed confidential under UUJN and the notary's obligation to report the contents of the deed on suspicious financial transactions and the legal consequences for a notary who does not apply the principle of recognizing service users.

The research method used is normative legal research, namely legal research conducted by examining library materials or secondary legal materials, while the problem approach is carried out using a statute and conceptual approach.

The results of the study show that the principle of recognizing service users for Notaries only determines formal requirements in making authentic deeds based on UUJN, and has no responsibility for determining material truth as based on Permenkuham Number 9 of 2017. Based on the hierarchy of laws and regulations, Notaries are not required to implement Permenkuham Number 9 of 2017, in principle, the Minister of Justice and Human Rights is contrary to Article 16 paragraph 1 letter (f) of the Notary Office Law, which provides an exception for a Notary in relation to the confidentiality of his position if ordered by law, not statutory regulations. A Notary cannot be subject to Administrative sanctions, and has not been able to carry out the obligations ordered by Permenkuham Number 9 of 2017, because the regulations are unclear because the implementing regulations must be in harmony or harmony with the laws and regulations that are above them or those who order them to be formed.

Keywords: Notary, Law on Notary Office, Principles of Recognizing Service User

RINGKASAN

PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA DALAM PELAKSANAAN JABATAN NOTARIS DITINJAU DARI KEWENANGAN NOTARIS YANG DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS

Tesis ini menganalisis mengenai penerapan prinsip mengenali pengguna jasa dalam pelaksanaan jabatan Notaris ditinjau dari kewenangan Notaris yang diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris

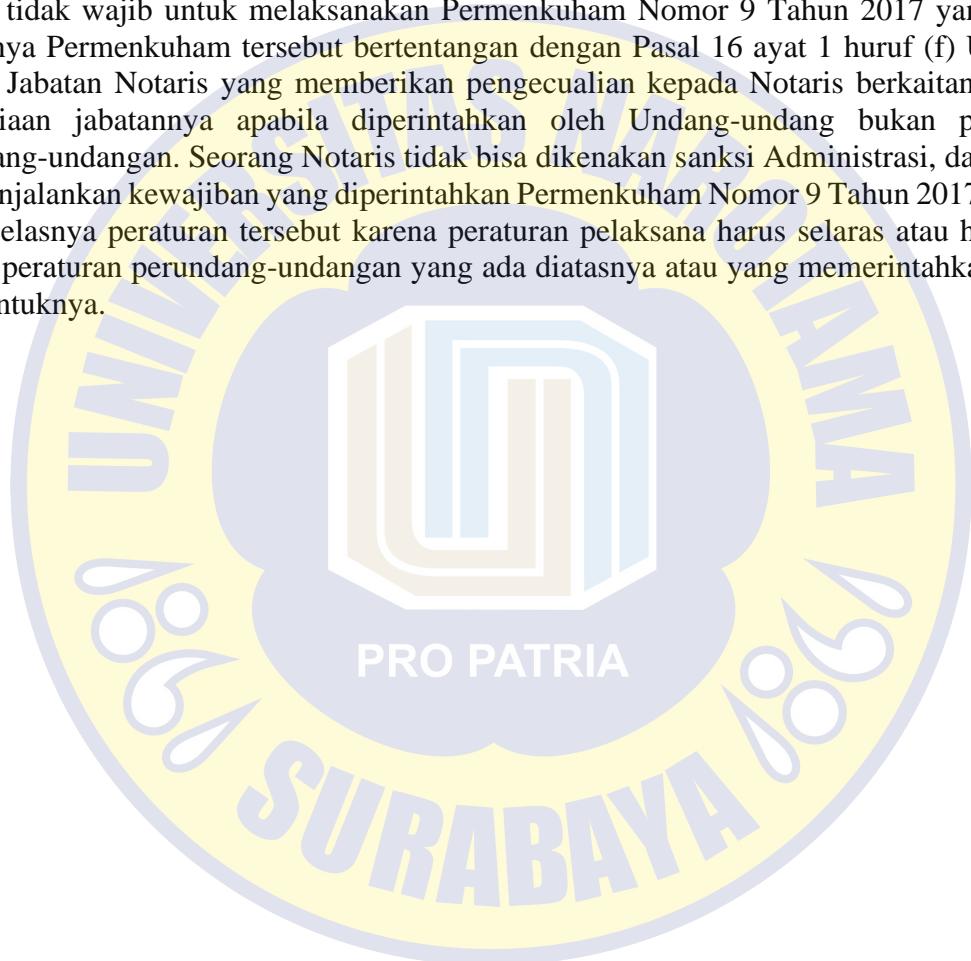
Bab I, menguraikan tentang latar belakang masalah mengenai pelaksanaan tugas dan kewajiban Notaris dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) dalam melaksanakan jabatannya pada proses pembuatan akta, dan saat menuangkan kesepakatan para pihak, Notaris harus menerapkan identifikasi, verifikasi, dan pemantauan, agar yang disepakati para pihak tidak bertentangan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Peraturan Perundang-undangan lainnya serta melakukan pemantauan transaksi sumber dana kliennya dan melaporkan terkait adanya indikasi pelanggaran Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Bab II merupakan hasil penelitian dan pembahasan dari rumusan masalah yang pertama. Apakah terdapat konflik norma antara kewajiban Notaris dalam merahasiakan isi akta berdasarkan UUJN dengan kewajiban Notaris melaporkan isi akta pada transaksi keuangan yang mencurigakan. Bila dianalisis menggunakan asas *lex superior derogate legi inferiori* dikaitkan dengan konflik norma antara konflik norma antara Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf f dan pasal 54 ayat (1) UUJN dengan norma Pasal 3 PP Pelapor TPPU maka konteksnya jelas bahwa dengan asas tersebut norma merahasiakan akta berdasarkan kekuatan UUJN mengalahkan kewajiban melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan yang hanya diatur dalam PP Pelapor TPPU yang tingkatan hierarki lebih rendah dibandingkan UUJN.

Bab III merupakan hasil penelitian dan pembahasan dari rumusan masalah yang kedua. Apakah akibat hukum terhadap Notaris yang tidak menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa. Sanksi terhadap Notaris diatur pada akhir UUJN, yaitu pada Pasal 84 dan Pasal 85 UUJN Jika ketentuan sebagaimana dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52 tersebut tidak dipenuhi, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum. Penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga merupakan akibat yang akan diterima Notaris jika akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 85 UUJN, yaitu jika Notaris melanggar ketentuan Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal

59, dan/atau Pasal 63 maka Notaris akan dijatuhi sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian tidak hormat.

Bab IV merupakan bab penutup yaitu menguraikan tentang kesimpulan dan saran penulis. Penulis menyimpulkan bahwa prinsip mengenali pengguna jasa bagi Notaris hanya menentukan syarat formal dalam pembuatan akta autentik berdasarkan UUJN, dan tidak memiliki tanggung jawab untuk menentukan kebenaran materiil sebagaimana berdasarkan Permenkuham Nomor 9 Tahun 2017. Berdasarkan hierarki peraturan Perundang-undangan Notaris tidak wajib untuk melaksanakan Permenkuham Nomor 9 Tahun 2017 yang mana prinsipnya Permenkuham tersebut bertentangan dengan Pasal 16 ayat 1 huruf (f) Undang-undang Jabatan Notaris yang memberikan pengecualian kepada Notaris berkaitan dengan kerahasiaan jabatannya apabila diperintahkan oleh Undang-undang bukan peraturan Perundang-undangan. Seorang Notaris tidak bisa dikenakan sanksi Administrasi, dan belum bisa menjalankan kewajiban yang diperintahkan Permenkuham Nomor 9 Tahun 2017, karena belum jelasnya peraturan tersebut karena peraturan pelaksana harus selaras atau harmonis dengan peraturan perundang-undangan yang ada diatasnya atau yang memerintahkan untuk membentuknya.



DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Lembar Prasayarat Gelar	ii
Lembar Persetujuan	iii
Lembar Pengesahan	iv
Halaman Pengesahan	v
Lembar Penetapan Penguji Tesis	vi
Pengajuan Judul Tesis	vii
Kesediaan Membimbing Tesis	viii
Persetujuan Dewan Tesis	ix
Surat Penugasan	x
Kartu Bimbingan Proposal Tesis	xi
Surat Keterangan Lulus Plagiasi Proposal Tesis	xiii
Pengajuan Ujian Proposal Tesis	xiv
Persetujuan Perbaikan Penilaian Proposal Tesis	xv
Kartu Kehadiran Mengikuti Proposal Tesis	xvi
Kartu Bimbingan Tesis	xviii
Surat Keterangan Lulus Plagiasi Naskah Tesis	xx
Pengajuan Ujian Tesis	xxi
Persetujuan Perbaikan Penilaian Naskah Tesis	xxii
Surat Pernyataan Keaslian Tesis	xxiii
Kata Pengantar	xxiv
Abstrak	xxvi
<i>Abstract</i>	xxvii
Ringkasan	xxviii
Daftar Isi	xxix

BAB I. PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah	15
3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	16
3.1. Tujuan Penelitian	16
3.1.1. Tujuan Umum.....	16
3.1.2. Tujuan Khusus	16
3.2. Manfaat Penelitian	17
3.2.1. Manfaat Teoritis	17
3.2.2. Manfaat Praktis	17
4. Orisinalitas Penelitian.....	17
4.1. Tesis Astuti Aksan (2015)	17
4.2. Tesis Mudiana Permata Sari (2017)	19
4.3. Tesis Elisabeth (2019)	20
5. Tinjauan Pustaka	22
5.1. Teori Perundang-undangan	22
5.2. Teori Tanggung Jawab Hukum	26
6. Metode Penelitian	28
6.1. Tipe Penelitian.....	28
6.2. Pendekatan Penelitian.....	29
6.2.1. Pendekatan Perundang-Undangan (<i>Statute Approach</i>)	29
6.2.2. Konseptual (<i>Conceptual Approach</i>)	30
6.3. Sumber Bahan Hukum	31
6.3.1. Bahan Hukum Primer	31
6.3.2. Bahan Hukum Sekunder	32
7. Sistematika Penulisan	33
BAB II. Apakah Ada Kewajiban Notaris Dalam Merahasiakan	

Akta Berdasarkan UUJN Dengan Kewajiban Notaris	
Melaporkan Isi Akta Sesuai Dengan PMPJ.....	35
2.1.Notaris Sebagai Pejabat Umum	35
2.2.Pengertian Kewenangan Seorang Notaris	41
2.3.Kewajiban Notaris untuk merahasiakan Informasi Dari Klien	44
2.4.Kode Etik Notaris	47
2.5.Mengenai Tentang Kewajiban Ingkar Notaris	49
2.6.Permasalahan Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Jabatan Notaris.....	52
2.7.Asas Preferensi Hukum.....	61
2.7.1. Harmonisasi Hukum.....	67
BAB III. Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Tidak Menerapkan	
Prinsip Mengenali Pengguna Jasa.....	71
3.1. Jabatan Notaris sebagai Jabatan Terhormat (<i>Officium Nobile</i>)	71
3.2. Hakikat Notaris	79
3.2.1. Notaris Sebagai Jabatan.....	81
3.3. Hakikat dan Jenis Sanksi PRO PATRIA	89
3.3.1. Sanksi Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris	92
3.3.2. Upaya Hukum Notaris Terhadap Keputusan Majelis Pengawas Daerah yang Telah Menyetujui Notaris untuk Diperiksa Berdasarkan Pasal 66 UUJN	100
3.4. Harmonisasi UUJN Dengan Peraturan Pelaksana Dan Peraturan Kebijakan.....	111
BAB IV. PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	116
4.2. Saran	117
DAFTAR PUSTAKA.....	118